

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara dukungan pemerintah daerah yang telah memberikan fasilitas Sistem Informasi Desa (SID) kepada Desa Muaro Pijoan dengan kondisi riil di lapangan yang belum siap, baik dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur, anggaran, maupun perangkat hukum. Akibatnya, penerapan e-government di Desa Muaro Pijoan belum berjalan optimal dan pelayanan publik masih banyak dilakukan secara manual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan Pemerintah Desa Muaro Pijoan masih rendah. Dari sisi infrastruktur, perangkat komputer dan laptop yang tersedia terbatas dan sebagian besar tidak layak pakai. Dari aspek pemanfaatan teknologi, website SID baru berfungsi sebatas penyampaian informasi satu arah dan belum mendukung layanan publik interaktif. Dari sisi sumber daya manusia, sebagian besar aparatur tidak memiliki latar belakang pendidikan teknologi informasi dan belum mengikuti pelatihan khusus. Dari aspek anggaran, belum tersedia alokasi khusus untuk mendukung e-government, sedangkan dari aspek perangkat hukum, desa belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur, pelatihan aparatur desa, penyusunan perangkat hukum, serta alokasi anggaran khusus agar penerapan e-government dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Pemerintah Desa Muaro Pijoan dalam penerapan e-government serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada Kepala Desa, perangkat desa, dan staf pelayanan.

**Kata Kunci: Kesiapan, Pemerintah Desa, E-Government, Muaro Pijoan**

## ABSTRACT

*This research is motivated by the gap between the support provided by the local government, which has provided the Village Information System (SID) facility to Muaro Pijoan Village, and the actual situation on the ground, which is not yet ready, both in terms of human resources, infrastructure, budget, and legal framework. As a result, the implementation of e-government in Muaro Pijoan Village has not been optimal, and public services are still largely performed manually. This research used a qualitative, descriptive approach. Data collection techniques included observation, interviews, documentation, and literature review. The results indicate that the readiness of the Muaro Pijoan Village Government remains low. In terms of infrastructure, available computers and laptops are limited and mostly unusable, and the internet connection is unstable. In terms of technology utilization, the SID website only functions as a one-way information delivery service and does not yet support interactive public services. In terms of human resources, most officials lack educational backgrounds in information technology and have not received specialized training. From a budgetary perspective, there is no specific allocation to support e-government, and from a legal perspective, the village does not yet have a Village Regulation (Perdes) governing its implementation. Therefore, infrastructure improvements, village apparatus training, legal framework development, and dedicated budget allocation are needed to ensure more effective, efficient, and sustainable e-government implementation. This study aims to determine the readiness of the Muaro Pijoan Village Government for e-government implementation and identify factors influencing this readiness. The method used is qualitative, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation with the Village Head, village officials, and service staff.*

**Keywords:** *Readiness, Village Government, E-Government, Muaro Pijoan*